

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu (Sadono, 2006). Pada dasarnya suatu pembangunan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup manusia ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah pembangunan yang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, karena dengan pembangunan ekonomi dapat mendorong pembangunan pada bidang lainnya (Fastabiqul, dkk, 2020).

Pembangunan ekonomi menurut Yulia dan Eko (2017) mengarah pada masalah perkembangan ekonomi di daerah-daerah otonom. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka terjadi pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang awalnya sentralis menjadi desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya (Yayu, dkk, 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan. Desentralisasi pembangunan dipusatkan di daerah-daerah dimaksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri.

Pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak lepas dari pembangunan pertanian (Marianus, dkk, 2016). Hal tersebut menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, karena sektor pertanian masih mendominasi dan merupakan salah satu sektor yang berperan cukup besar dalam pembangunan nasional. Pembangunan pertanian juga merupakan salah satu upaya agar suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam serta potensi yang dimiliki suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan agar

menghasilkan pemanfaatan sumber daya alam di daerah dapat dilakukan secara maksimal.

Upaya mencapai tujuan pembangunan pertanian dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan mulai dari wilayah terkecil di setiap daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sekaligus sebagai sektor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah adalah dengan melakukan pembangunan wilayah kecamatan berbasis komoditas unggulan pertanian. Komoditas unggulan yang dihasilkan suatu wilayah memiliki kemampuan menghasilkan dengan biaya relatif rendah, sehingga diharapkan mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama dari wilayah lain baik di pasar lokal, nasional maupun global.

Pengembangan komoditas pertanian juga harus disesuaikan dengan kondisi daerah setempat seperti kondisi agroklimat, sumber daya manusia juga sarana dan prasarana yang ada sehingga komoditas tersebut dapat dikembangkan lebih baik menjadi komoditas unggulan daerah (Sri, 2021).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat keunggulan suatu komoditas menurut Adisasmita (2012) adalah berdasarkan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki suatu sektor ekonomi disuatu daerah dimana sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan domestik dan dapat diekspor ke daerah lain. Sedangkan keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki suatu sektor ekonomi disuatu daerah dimana sektor tersebut mampu bersaing atau memiliki daya saing.

Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan perkembangan ekonomi daerah merupakan bentuk dari beberapa subsektor yang terdiri dari perkebunan, peternakan, tanaman pangan, kehutanan dan perikanan (Sitinur, dkk, 2020). Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah pada sektor pertanian.

Menurut data kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut, sektor pertanian selalu menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Angka dan Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021.

	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.414.994,61 (31,76%)	12.483.738,73 (32,34%)	12.934.341,96 (32,35%)
B	Pertambangan dan Penggalian	817.334,26 (2,09%)	811.710,79 (2,10%)	822.167,94 (2,06%)
C	Industri Pengolahan	3.383.587,45 (8,66%)	3.367.915,16 (8,73%)	3.567.011,51 (8,92%)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23.495,05 (0,06%)	23.211,82 (0,06%)	25.574,75 (0,06%)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.823,76 (0,05%)	21.095,75 (0,05%)	23.168,20 (0,06%)
F	Konstruksi	2.617.084,39 (6,69%)	2.470.953,46 (6,40%)	2.639.526,18 (6,60%)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.478.340,22 (21,69%)	7.908.331,83 (20,49%)	8.151.735,85 (20,39%)
H	Transportasi dan Pergudangan	1.512.342,31 (3,87%)	1.463.742,26 (3,79%)	1466.841,23 (3,67%)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.573.304,42 (4,02%)	1.525.256,04 (3,95%)	1.529.142,56 (3,82%)
J	Informasi dan Komunikasi	1.204.150,42 (3,08%)	1.482.959,17 (3,84%)	1.590.937,59 (3,98%)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.111.069,85 (2,84%)	1.116.359,39 (2,89%)	1.164.750,08 (2,91%)
L	Real Estate	786.043,55 (2,01%)	784.842,48 (2,03%)	863.155,20 (2,16%)
M,N	Jasa Perusahaan	239.564,50 (0,61%)	207.351,60 (0,54%)	225.069,31 (0,56%)
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.186.165,14 (3,03%)	1.165.485,11 (3,02%)	1.155.428,31 (2,89%)
P	Jasa Pendidikan	1.950.600,08 (4,99%)	2.047.078,94 (5,30%)	2.069.349,32 (5,18%)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	323.645,86 (0,83%)	307.176,85 (0,80%)	330.491,38 (0,83%)
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.450.945,86 (3,71%)	1.410.935,91 (3,66%)	1.422.499,47 (3,56%)
Produk Domestik Bruto		39.092.491,73	38.598.145,31	39.981.190,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut (2022)

Tampak pada Tabel 1. persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Garut selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021) memberikan kontribusi yang besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Kenaikan kontribusi tersebut terlihat dari yang awalnya 31,76 persen pada tahun 2019 naik menjadi 32,34 pada tahun 2020, padahal pada tahun 2020 tepatnya pada Bulan Maret 2020 mulai muncul Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Indonesia. Hal ini terjadi karena pada saat sebagian sektor lain tumbuh negatif, sektor pertanian tetap tumbuh positif. Sektor pertanian menjadi penampung tenaga kerja yang

mengalami pemutusan hubungan kerja dari sektor lain dan juga menambah angkatan kerja baru yang masuk ke pertanian sehingga sektor pertanian mengurangi melonjaknya pengangguran (Fatabiqul, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting terhadap perekonomian di Kabupaten Garut, karena sebagian besar kegiatan ekonomi di Garut masih didominasi sektor pertanian serta semua sub sektor pertanian juga berkembang dengan baik.

Hasil produksi tiap sub sektor pertanian di Kabupaten Garut dapat dilihat pada Tabel 2.

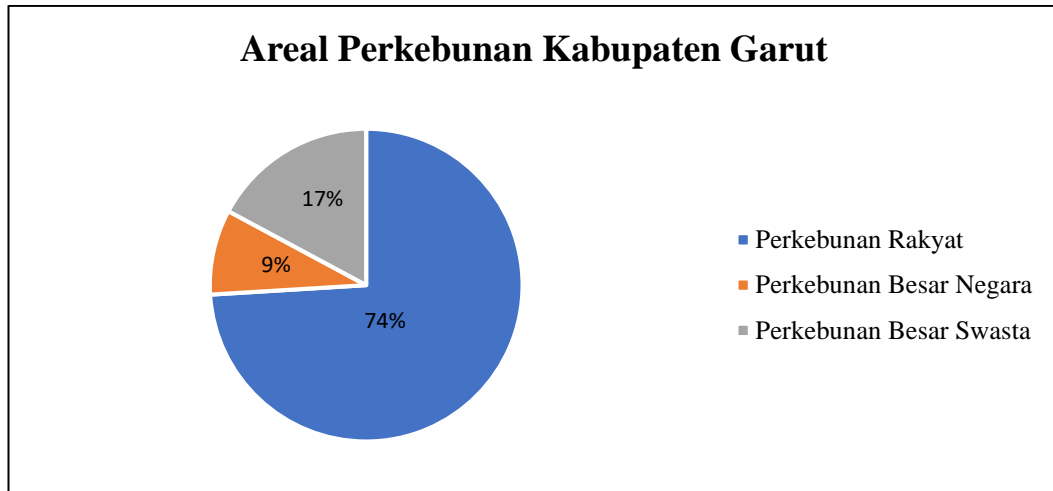
Tabel 2. Hasil Produksi Tiap Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Garut Tahun 2019-2020

No	Sub Sektor	Hasil Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.273.892,10	3.077.004,54	3.108.901,67
2	Perkebunan	32.324,94	34.288,31	35.031,41
3	Peternakan	69.253,74	42.823,12	35.656,69
4	Perikanan	63.917,85	62.618,56	63.758,70
5	Kehutanan	3.261,92	6.991,82	6.873,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2022)

Berdasarkan Tabel 2, hasil produksi sub sektor perkebunan selama tiga tahun cenderung selalu meningkat secara lebih konsisten dibandingkan dengan sub sektor pertanian lainnya. Hal tersebut karena Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah sentra produksi perkebunan yang potensial di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mamur, Aulia, dan Edi (2022) yang menyatakan bahwa Kabupaten Garut merupakan setra produksi komoditas perkebunan yang potensial di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Sub sektor perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Perannya terlihat nyata dalam penerimaan devisa negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku berbagai industri dalam negeri, perolehan nilai tambah dan daya saing serta optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Perkebunan dibagi menjadi tiga jenis yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta (Dinas Perkebunan, 2021). Luas areal perkebunan di Kabupaten Garut tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Luas Areal Perkebunan Kabupaten Garut Tahun (2021)
 Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (2021)

Berdasarkan Gambar 1. perkebunan rakyat memiliki areal yang lebih luas di Kabupaten Garut. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang tidak berbadan hukum, sehingga dikelola atau diselenggarakan dalam usaha kecil dan usaha rumah tangga. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut (2021), Kabupaten Garut memiliki beberapa komoditas yang cukup berpotensi untuk dikembangkan dan dijadikan komoditas unggulan di Kabupaten Garut. Komoditi perkebunan rakyat di Kabupaten Garut terdiri dari 25 komoditas yang tersebar di 42 kecamatan, sehingga perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di setiap kecamatan.

Adanya berbagai macam komoditas tanaman perkebunan rakyat yang dihasilkan di Kabupaten Garut, maka perlu diketahui peran komoditi tanaman perkebunan tersebut untuk menentukan dan mengenali potensi sub sektor perkebunan yang dihasilkan di masing-masing kecamatan, sehingga dapat diketahui sub sektor perkebunan yang menjadi basis. Selain itu juga perlu diketahui komponen pertumbuhan dari komoditas-komoditas tanaman perkebunan tersebut, sehingga dapat dipilih komoditas tanaman perkebunan yang dapat diprioritaskan dan dapat diunggulkan untuk dikembangkan dengan lebih terarah dan efisien di masa mendatang guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Komoditas sub sektor perkebunan rakyat apa yang merupakan basis di wilayah kecamatan di Kabupaten Garut?
2. Komoditas sub sektor perkebunan rakyat apa sajakah yang menjadi prioritas pengembangan utama pada wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Garut?
3. Komoditas sub sektor perkebunan rakyat apa yang merupakan komoditas unggulan di wilayah kecamatan di Kabupaten Garut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Komoditas sub sektor perkebunan rakyat yang menjadi basis di wilayah kecamatan di Kabupaten Garut.
2. Komoditas sub sektor perkebunan rakyat yang menjadi prioritas pengembangan utama di wilayah kecamatan di Kabupaten Garut.
3. Komoditas sub sektor perkebunan rakyat yang menjadi unggulan di wilayah kecamatan di Kabupaten Garut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penambahan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan perencanaan wilayah mengenai pengembangan komoditas potensial di suatu lokasi.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan, khususnya pengembangan komoditas perkebunan basis yang menjadi prioritas pengembangan dan unggulan di Kabupaten Garut.